



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI, DIRJEN PENEGAKAN
HUKUM KEMENTERIAN LHK RI, DIRJEN PPKL KEMENTERIAN LHK RI, DIRJEN
PSLB3 KEMENTERIAN LHK RI, DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN KEMENTERIAN LHK RI, JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA
KHUSUS KEJAKSAAN AGUNG RI, DAN KABARESKRIM POLRI, DAN RDPU
DENGAN KETUA ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA (IMA), KETUA UMUM
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA (APBI) DAN PERUSAHAAN
TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Dirjen PPKL Kementerian LHK RI, Dirjen PSLB3 Kementerian LHK RI, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, dan Kabareskrim Polri, dan RDPU Dengan Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA), Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan Perusahaan Tambang Mineral Dan Batubara
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 19 Maret 2019
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d 21.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: Muhammad Nasir (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Demokrat)
Sekretaris Rapat	: Dwiyanti, S.Sos
Hadir Anggota	: ... Orang dari 49 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Acara	: 1. Evaluasi Perusahaan yang tidak memenuhi DMO Batubara Tahun 2018 2. Evaluasi persetujuan ekspor mineral Tahun 2018 dan proyeksi Tahun 2019 3. Mekanisme penetapan produksi minerba berbasis Provinsi termasuk IUP Daerah 4. Lain-lain.

CATATAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 dibuka pukul 19.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Evaluasi Perusahaan yang tidak memenuhi DMO Batubara Tahun 2018
 - b. Evaluasi persetujuan ekspor mineral Tahun 2018 dan proyeksi Tahun 2019
 - c. Mekanisme penetapan produksi minerba berbasis Provinsi termasuk IUP Daerah
 - d. Lain-lain

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba KESDM RI dan Dirjen Gakkum Kementerian LHK RI, dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK RI untuk menyampaikan data-data terkait:
 - a. Perusahaan yang belum menyetor dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai kewajiban yang telah ditetapkan
 - b. Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang untuk pemulihan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan minerba
 - c. Perusahaan yang tidak mengelola limbah dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perusahaan-perusahaan tambang minerba
 - d. Perusahaan yang mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
 - e. 592 Perusahaan yang telah diproses Pidana Lingkungan
2. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk memberikan surat teguran terhadap seluruh perusahaan pertambangan yang belum menyetor dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Terhadap perusahaan yang hingga satu bulan setelah diberikan surat teguran belum melaksanakan kewajiban reklamasi, maka Dirjen Minerba Kementerian ESDM harus mencabut IUP perusahaan tersebut

3. Komisi VII DPR RI sepakat untuk mengagendakan kembali Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Dirjen PPKL Kementerian LHK RI, Dirjen PSLB3 Kementerian Lhk Ri, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Dan Kabareskrim Polri, Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA), Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan Perusahaan Tambang Mineral dan Batubara yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 21.45 WIB

Jakarta, 19 Maret 2019
KETUA RAPAT,



MUHAMMAD NASIR